

# EKONOMI ISLAM : *Survey Literatur*

Yuhka Sundaya

*Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Bandung*

[yuhkas@yahoo.com](mailto:yuhkas@yahoo.com)

[www.sundaya.blogspot.com](http://www.sundaya.blogspot.com)

**Abstrak.** This paper presents the scope of Islamic economics. Authors conducted a study of the literature survey to show wide definition of Islamic economics, its methodology, as well as the scope of the discussion and Islamic microeconomic and macroeconomic. Overall, Islamic economics is an advance or extension of conventional economics. This assessment was appointed as Muslim economists in fact have disrupted basic assumptions or postulates of conventional economists in explaining human behavior.

**Keywords :** Islamic Economic

## 1. Pendahuluan

Menurut Chapra (2001), ilmu ekonomi dalam perspektif Islam atau ilmu ekonomi Islam mengalami kebangkitan kembali hanya tiga atau empat dekade lalu, setelah tenggelam dalam sejarah beberapa abad lamanya. Tujuh tahun sebelumnya, Khan (1994) menilai bahwa pendekatan ilmu ekonomi neoklasik terlalu sempit, asumsinya tidak realistis dan strateginya tidak humanis. Khan (1994) dan Chapra (2001) sepakat memandang bahwa ilmu ekonomi konvensional bersifat sekuler, kandungan nilai ilmunya netral, dan tidak memasukan nilai moral serta keadilan dalam analisisnya.

Kritik terhadap ilmu ekonomi konvensional tidak hanya datang dari para ahli ekonomi muslim. Para ahli

ekonomi konvensional sendiri terus mengkritik teori yang berkembang, kemudian memperluasnya hingga teori tersebut mendekati realitasnya. Sebetulnya tidak begitu rumit. Teori adalah kerangka kerja atau disebut juga alat untuk menjelaskan sebuah fenomena ekonomi secara deduktif. Ahli ekonomi menggunakan teori untuk membuat argumentasi yang sifatnya tentatif atau bersifat sementara. Mengapa ? Di dalam teori terdapat asumsi atau anggapan atau pernyataan yang dianggap benar tanpa pengujian terlebih dahulu. Contohnya teori permintaan yang sederhana. Teori tersebut bisa memprediksi bahwa kenaikan harga suatu barang dapat menurunkan jumlah permintaan terhadap barang tersebut, dengan asumsi pendapatan dan selera konsumen tidak berubah dan barang tersebut adalah barang normal. Kita mengenalnya dengan

*ceterisparibus*. Prediksinya bisa akurat bila asumsi tersebut secara actual terjadi. Sebaliknya, prediksi tersebut bisa meleset bila asumsinya secara actual tidak terjadi. Bila ternyata jenis barang tersebut adalah barang mewah, prediksinya bisa terbalik, semakin mahal barang tersebut permintaannya bisa naik. Bahkan prediksi inipun bisa meleset, bila pada sisi lain pendapatan dan selera konsumen mengalami penurunan. Kondisi aktual yang dijadikan asumsi tersebut dalam dunia sosial seringkali mudah pecah atau berubah. Karena itu wajar saja bila teori akan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kondisi ekonomi aktual. Dan salah satu keahlian ahli ekonomi adalah menyesuaikan asumsi dibalik sebuah teori dengan kondisi aktualnya supaya prediksinya akurat.

Dalam beberapa segi, teori ekonomi konvensional dipandang tidak memadai untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku ekonomi muslim. Perilaku ekonomi muslim dalam ranah teoritis cukup kompleks, dan secara empiris hampir seperlima penduduk dunia adalah muslim yang tersebar di 47 negara. Artinya seperlima penduduk dunia tersebut bekerja di bawah hukum Islam yang mengatur ibadah dan muamalah, dimana kehidupan ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hukum Islam atau syariah yang harus dipatuhi oleh umat muslim tidak tertangkap oleh ekonomi konvensional. Itulah salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi Islam.

Untuk menangkap ruang lingkup kajian ekonomi Islam, selanjutnya paper ini distruktur menjadi lima bagian utama. Pada bagian kedua disajikan pengertian ilmu ekonomi Islam yang coba

dibandingkan dengan ilmu ekonomi konvensional. Dengan membuka pengertian tersebut diharapkan menggambarkan kedalaman materi dalam ekonomi Islam. Bagian ketiga berisi metodologi yang digunakan oleh ahli ekonomi muslim. Informasi yang digunakan oleh para ahli ekonomi muslim tidak hanya bersumber dari data empiris dan teoritis, lebih dari itu Al Qur'an dan Sunnah menjadi sumber acuan yang diolah oleh ahli ekonomi muslim. Bagian keempat menyajikan fitur atau ciri umum mikroekonomi Islami. Bagian kelima menyajikan fitur makroekonomi Islami. Secara umum, mikroekonomi Islami merupakan alat berupa kerangka kerja untuk menganalisis perilaku ekonomi muslim dalam posisinya sebagai konsumen dan produsen, sedangkan makroekonomi Islami merupakan kerangka kerja yang cocok digunakan oleh pemerintah untuk menganalisa perekonomian secara umum. Paper ini tidak membahas masalah ekonomi tertentu, dan karenanya bagian akhir paper ini menampilkan sebuah penutup untuk meringkas dan memberikan *clue* bagi pembaca untuk mendalami ekonomi Islam lebih lanjut.

## **2. Ekonomi Islam : Sebuah Perluasan dari Ekonomi Konvensional**

Ekonomi Islam dan konvensional merupakan teori. Tapi, ekonomi Islam mengandung juga ajaran moral ekonomi yang harus dipatuhi oleh muslim dalam posisinya sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Al-Qur'an dan as-Sunnah menjadi pedoman hidup muslim dalam beribadah dan bermuamalah. Sumber hukum Islam tersebut membentuk perilaku muslim, termasuk dalam bagian

yang lebih sempitnya adalah dalam hal ekonomi. Ekonomi Islam merupakan proyek akademis yang belum paripurna, dan masih terus dikembangkan.

Teori adalah kerangka kerja untuk menjelaskan sebuah fenomena ekonomi. Penjelasan dan prediksi merupakan tujuan dari ilmu ekonomi sebaik ilmu-ilmu lainnya. Analisa teoritis dan penelitian empiris dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Keduanya saling melengkapi. Analisa teoritis lebih bersifat abstrak deduktif dengan menggunakan asumsi-asumsi, sedangkan penelitian empiris bersifat induktif. Teori menyajikan petunjuk untuk penelitian empiris dan penelitian empiris menyajikan pengujian asumsi dan kesimpulan teoritis (Henderson dan Quandt, 1980).

Lebih lanjut, menurut Henderson dan Quandt (1980) suatu teori mengandung tiga macam elemen : (1) data yang memainkan peran sebagai parameter dan diasumsikan tetap dari luar kerangka kerja analitik; (2) variabel, besaran (*magnitudes*) yang ditentukan dalam teori; dan (3) asumsi perilaku atau postulat yang diartikan sebagai suatu himpunan operasi untuk menentukan nilai-nilai variabel. Kesimpulan dari arugumen teoritis selalu mempertanyakakan "apa yang akan terjadi". Teori menyajikan hasil proses ekonomi jika asumsinya dipenuhi. Tahap awal untuk memahami kegunaan ilmu ekonomi adalah dengan memahami definisi dari ilmu ekonomi itu sendiri.

Tidak ada definisi tunggal mengenai ilmu ekonomi, begitupun halnya dengan ekonomi Islam. Menurut Henderson dan Quandt (1980) Ilmu ekonomi bukan merupakan disiplin ilmu yang didefinisikan secara jelas.

Batasannya selalu berubah secara konstan, dan pengertiannya merupakan sumber kontroversi secara frekuentif. Tabel 1 menyajikan beberapa definisi ilmu ekonomi tersebut.

**Tabel 1. Beberapa definisi Ilmu Ekonomi Konvensional**

| No | Sumber         | Definisi Ilmu Ekonomi  |
|----|----------------|--|
| 1. | Marshal (1890) | Politik ekonomi atau ilmu ekonomi adalah suatu kajian mengenai umat manusia dalam kehidupan bisnis; ilmu ini menguji bagian kegiatan individu dan sosial dalam kaitan pencapaian hasil dengan penggunaan bahan baku (material) yang diperlukan bagi kesejahteraan. |
| 2. | Lionel Robbin  | Ilmu ekonomi adalah kajian mengenai alokasi alat pemenuh kebutuhan yang bersifat langka, kemampuan alternatif penggunaannya diantara tujuan akhir yang saling bersaing untuk mencapai hasil yang maksimum dalam mencapai tujuan                                    |

| No | Sumber       | Definisi Ilmu Ekonomi   |
|----|--------------|---|
|    |              | itu.  |
| 3. | Fraser       | Dalam ilmu ekonomi tidak hanya mengkaji bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana harga ditentukan, akan tetapi dikaji pula bagaimana timbul/munculnya pendapatan nasional.  |
| 4. | J.M. Keynes  | Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian mengenai pengelolaan ( <i>administration</i> ) kelangkaan sumber daya dan penentu ( <i>determinant</i> ) pendapatan dan pekerjaan. Dengan perkataan lain menurut Dewett (2001;7) adalah kajian mengenai sebab fluktuasi ekonomi untuk melihat bagaimana stabilitas ekonomi. |
| 5. | Dewet (2001) | Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai suatu ilmu sosial yang fokusnya terkait dengan penggunaan dan alokasi sumber daya yang wajar untuk mencapai dan  |

| No | Sumber             | Definisi Ilmu Ekonomi   |
|----|--------------------|---|
|    |                    | mempertahankan stabilitas pertumbuhan, atau ilmu sosial yang perhatian utamanya terkait dengan cara pilihan masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang terbatas, yang mana sumber daya itu memiliki alternatif penggunaan untuk menghasilkan barang dan jasa bagi konsumsi saat ini dan masa mendatang. Pengertian ini menggambarkan dan menganalisis (memahami) natur dan perilaku dari perekonomian. |
| 6. | Henry Smith (1968) | ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana suatu masyarakat sipil memperoleh bagian dari apa yang orang lain hasilkan dan bagaimana produksi total dari masyarakat berubah-ubah dan ditentukan.  |
| 7. | Prof. Viner        | Ilmu ekonomi adalah apa yang dilakukan oleh ahli  |

| No | Sumber               | Definisi Ilmu Ekonomi   |
|----|----------------------|---|
|    |                      | ekonomi.  |
| 8. | Kautsoyiannis (1979) | Teori ekonomi memiliki tujuan untuk membangun model yang menggambarkan perilaku ekonomi individual (konsumen, perusahaan, pemerintah) dan interaksinya yang menciptakan sistem ekonomi suatu wilayah, negara atau dunia secara keseluruhan. |
| 9. | Garry S. Becker      | Ilmu ekonomi adalah alat untuk menjelaskan sebuah fenomena ekonomi.   |

Sumber : Dewet (2001)

Meskipun definisi ilmu ekonomi berbeda-beda, namun di kalangan ahli ekonomi konvensional terdapat kesamaan di dalam memandang perilaku manusia. Pandangan tersebut menjadi asumsi dibalik teori ekonominya. Menurut Akram Khan (1979) asumsi perilaku manusia yang mereka gunakan adalah : (1) manusia digerakan oleh kepentingan pribadi (*self – interest*) dan berperilaku secara rasional, (2) materi menjadi tujuan utama dari upaya yang dicurahkan oleh manusia, dan (3) manusia memiliki kecenderungan melekat untuk memaksimalkan kesejahteraan materialnya dan mereka

memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memutuskan yang terbaik bagi dirinya.

Asumsi tersebut dipandang terlalu sempit untuk menggambarkan pribadi muslim. Karena itulah, dari sisi teoritis, para ahli ekonomi muslim coba membangun teori ekonomi yang mampu menjelaskan perilaku ekonomi muslim dengan cara menyesuaikan asumsinya mengenai perilaku ekonomi muslim.<sup>5</sup> Upaya ahli ekonomi muslim ini dapat diartikan sebagai upaya perluasan teori ekonomi untuk bisa menjelaskan perilaku ekonomi dari seperlima penduduk muslim di dunia. Perilaku ekonomi muslim, baik sebagai konsumen dan produsen digerakan oleh ajaran Islam, meski dalam prakteknya ada yang patuh, moderat dan tidak patuh. Di dalam Al-Qur'an tersaji informasi mengenai perilaku manusia, dan inilah yang menjadi sumber galian para ahli ekonomi muslim di dalam memandang manusia. Dengan menggunakan asumsi yang cocok, maka kekuatan prediktif sebuah teori ekonomi Islam dapat diandalkan, dan tentu saja dilengkapi oleh informasi yang diperoleh melalui kerja penelitian empiris.

Dari segi teoritis, ilmu ekonomi Islam telah didefinisikan secara berbeda sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

<sup>5</sup>Muhammad (2006) juga mengatakan bahwa perbedaannya hanya dalam filosofi, sedangkan dalam ilmu sama saja. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi Islam, menyusunnya dari sumber utama al-Qur'an, as-Sunnah dan Khazanah Islam lainnya, tanpa mengabaikan ilmu ekonomi yang sudah ada yang dapat digunakan sebaik-baiknya untuk penyempurnaan.

Tabel 2. Beberapa Definisi Ilmu Ekonomi Islam

| No | Sumber            | Definisi Ilmu Ekonomi  |
|----|-------------------|--|
| 1. | Zaman (1984)      | Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syari'ah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. |
| 2. | Siddiqi (1992)    | Ekonomi Islam adalah pemikir muslim yang merespon terhadap tantangan ekonomi pada masanya. Dalam hal ini mereka dibimbing dengan Al Qur'an dan as-Sunnah beserta akal dan pengalamannya.   |
| 3. | Naqvi             | Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim tertentu.   |
| 4. | Akram Khan (1994) | Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kemenangan/kemakmuran (falāh) manusia  |

| No | Sumber                | Definisi Ilmu Ekonomi   |
|----|-----------------------|---|
|    |                       | (agar menjadi baik) yang dicapai melalui pengorganisasian sumber daya alam yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi.             |
| 5. | Mannan (1986)         | Ekonomi Islam merupakan suatu studi sosial yang mempelajari masalah ekonomi manusia berdasarkan nilai-nilai Islam.                      |
| 6. | Sarkaniputra, (2005)* | Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah. |

Sumber : Muhammad (2005)

Keterangan : \* kutipan di luar Muhammad (2005).

Perbedaan definisi ilmu ekonomi Islam ditimbulkan oleh adanya perbedaan mazhab. Sekurang-kurangnya terdapat tiga mazhab yang diidentifikasi oleh Karim (2006). *Pertama*, Mazhab Baqir as-Sadr yang dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal : *Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu

anti-Islam, yang lainnya Islam. Mazhab ini berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebab akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya mazhab ini berusaha untuk menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan dideduksi dari Al Qur'an dan As Sunnah.

*Kedua*, Mazhab mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik ekuilibrium. Namun jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang seringkali terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh misalnya, tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Dalilnya bersumber dari Al-Qur'an (2 : 155) :

Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi.

صَوَّأَلْجُوعِ الْخَوْفِ مِنْ بَشْيٍ ءِ وَلَنْبَلُونَكُمْ  
بَشِيرٍ وَالْثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنْ وَنَق  
الصَّابِرِينَ وَ

Terjemahnya : “dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dalilnya bersumber dari Al-Qur'an (102 : 1 – 5) :

الْمَقَابِرِ زُرْتُمْ حَتَّىٰ ۙ التَّكَاثُرِ الْهَلِكُمْ  
مَنْ سَوْفَ كَلَّا ثُمَّ ۙ تَعْلَمُونَ سَوْفَ كَلَّا  
الْيَقِينِ عِلْمَ تَعْلَمُونَ لَوْ كَلَّا ۙ تَعْلَمُ

Terjemahnya : “1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu (Maksudnya: Bermegah-megahan dalam soal banyak harta, anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan kamu dari ketaatan). 2. sampai kamu masuk ke dalam kubur. 3. janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), 4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. 5. janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,

Dan sabda Nabi Muhammad S.A.W bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah, ia akan inta tiga lembah dan seterusnya sampai ia masuk kubur.

Bila demikian, dimanakah letak perbedaan mazhab mainstream ini dengan ekonomi konvensional ?

Perbedaannya terletak pada cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas versus keinginan yang tidak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa Al Qur'an disebut "pilihan dilakukan dengan mempertuhankan hawa nafsunya". Tetapi dalam ekonomi Islami, keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semauanya saja. Perilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya-termasuk ekonomi-selalu dipandu oleh Allah lewat Qur'an dan Sunnah.

*Ketiga*, mazhab alternative-kritis adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan di University of Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya). Muhammad Arif dll. Mazhab ini mengkritik kedua mazhab sebelumnya. Mazhab baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara mazhab mainstream dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik dengan menghilangkan variable riba dan memasukan variable zakat serta niat.

Mazhab ini adalah sebuah mazhab kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islami adalah hasil tafsiran manusia atas Al Qur'an dan As Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.

Bagaimana ahli ekonomi muslim memandang manusia ? Menurut Muhammad (2004), ada beberapa asumsi dasar yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan ekonomi Islam. Dimana ringkasnya adalah : (1) manusia bersifat dualistik, yaitu mementingkan diri sendiri dan orang lain, (2) materi berupa benda hak milik menjadi kebutuhan sekunder untuk perkembangan moral dan spiritual manusia, (3) sumber daya alam dan lingkungan merupakan hak mutlak Allah SWT, manusia hanya memiliki hak untuk memanfaatkannya, dan karenanya kegiatan konsumsi, menyimpan dan investasi merupakan tindakan yang terbatas, dan (4) manusia bersifat universal (dalam arti bahwa umat manusia dan bangsa diciptakan Allah SWT semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri).

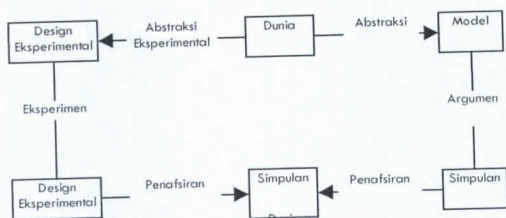
Dengan menggunakan asumsi pertama saja, maka teori ekonomi konvensional akan berubah total. Modelnya akan menyesuaikan diri dengan asumsi tersebut dan hasilnya akan memberikan informasi yang berbeda dari biasanya.



### 3. Bagaimana Ilmu Ekonomi dibangun ? : Konvensional Vs Ekonomi Islam

Produk ilmu jenis apapun adalah informasi, tidak terkecuali ekonomi. Informasi menjadi sumber daya untuk membantu pengambilan keputusan yang akurat dalam suatu masalah. Ahli ekonomi dan para pelaku ekonomi membutuhkan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan yang tepat. Bagaimana informasi tersebut dihasilkan ?

Informasi yang dihasilkan ilmu ekonomi konvensional diilustrasikan pada Gambar 1.



Sumber : Winardi (1992)

Dunia nyata digunakan sebagai titik tolak. Sebuah masalah tertentu, ataupun hasrat untuk mengetahui memberikan dorongan kepada ahli ekonomi untuk membuat penyederhanaan terhadap realitas yang kompleks (rumit). Dengan melakukan abstraksi teoritis, maka ahli ekonomi akan mengurangi kompleksitas dunia nyata *hingga* menghasilkan beberapa proposisi yang relevan. Tahap itu menghasilkan model logis yang mungkin cocok guna menerangkan fenomena yang sedang diamati (observed). Kemudian dengan menggunakan argument logis (proses deduksi), maka ahli ekonomi kemudian

mencapai simpulan-simpulan logis (informasi akhir) atau simpulan model. Akan tetapi hasil tersebut perlu ditransformasi melalui cara penafsiran teoritis ke dalam simpulan mengenai dunia nyata.

Dengan metode seperti itu, telah banyak teori yang dikembangkan oleh ahli ekonomi konvensional. Upaya pengembangan tersebut dilakukan untuk mengabstraksi fenomena ekonomi dari tingkat yang sederhana hingga kompleks. Mereka telah mampu menjelaskan perilaku manusia dari sifatnya yang individualistic hingga altruistic.

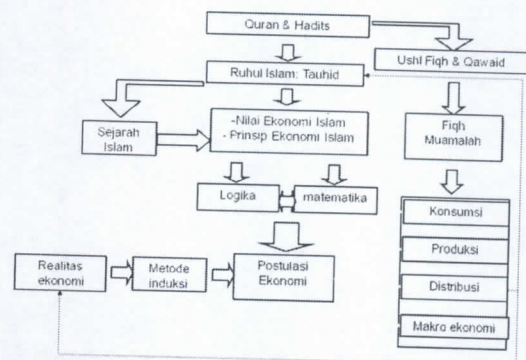
Dalam mikroekonomi tersaji berbagai kerangka kerja untuk menjelaskan beragam perilaku manusia. Teori konsumen menyajikan kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana manusia sebagai konsumen atau pengguna barang membuat keputusan untuk memilih berbagai alternative jumlah barang yang tersedia agar kegunaan barang tersebut optimal, dari yang sifatnya statis (tanpa mempertimbangkan unsur waktu) hingga dinamis (mempertimbangkan unsur waktu dan ketidakpastian). Teori produsen menyajikan kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana seorang pengusaha membuat keputusan untuk memilih alternative jumlah input (asupan) yang tersedia agar hasil produksinya optimal, dari yang sifatnya statis hingga dinamis dan multi produk. Teori pasar menyajikan kerangka kerja untuk menjelaskan perilaku konsumen dan produsen di bawah rezim struktur pasar tertentu : bersaing sempurna, monopolisti/monopsonistik, persaingan monopostik dan beberapa bentuk pasar yang bersaing secara tidak sempurna. Teori ekonomi kesejahteraan menyajikan

kerangka kerja untuk menjelaskan bagaimana kesejahteraan secara sosial bisa dicapai. Teori ekonomi rumahtangga menyajikan kerangka kerja untuk menjelaskan perilaku manusia dalam posisinya sebagai konsumen disatu pihak dan produsen pada pihak lain. Teori ini terus dikembangkan untuk menjelaskan perilaku altruistik manusia. Teori ekonomi informasi atau dikenal juga dengan istilah principle-agent menyajikan kerangka kerja untuk menjelaskan hubungan kontraktual. Masalah korupsi dan penipuan dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Teori mikroekonomi mampu menjelaskan perilaku manusia yang dianggap tidak memiliki pertimbangan moral.

Informasi yang dihasilkan oleh ahli ekonomi muslim berbeda dengan konvensional. Ilustrasi prosesnya disajikan pada Gambar 2. Sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist menjadi acuan ahli ekonomi muslim di dalam memahami realitas yang sedang mereka kaji. Sumber hukum tersebut berisi ajaran moral dan informasi mengenai sesuatu fenomena termasuk di dalamnya perilaku manusia di dalam bermuamalah. Dengan dilengkapi oleh pengetahuan mengenai sejarah islam, maka dapat diturunkan nilai ekonomi Islam dan prinsipnya. Kemudian, logika ahli ekonomi dapat diturunkan dari sana. Dengan dibantu oleh ilmu matematika, maka ahli ekonomi muslim dapat membuat postulasi ekonomi yang dilengkapi oleh metode induksi yang diangkat dari realitas ekonomi yang sedang dikaji. Menurut Suseno, terdapat tiga bidang yang melengkapi ahli ekonomi muslim : bidang studi Islam (dhirasah Islamiyah), bidang studi filsafat, dan bidang ilmu ekonomi (mikroekonomi,

makroekonomi, cabang-cabangnya, sejarah dan sejenisnya).

Dengan metode tersebut, telah banyak teori ekonomi Islam yang dihasilkan oleh para ekonom muslim. Dalam cabang mikroekonomi Islami telah dibangun beberapa teori mengenai : permintaan, konsumsi, produksi, penawaran, mekanisme pasar, efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Disamping teori, ekonomi Islam juga menyajikan informasi moral mengenai apa yang boleh dilakukan dan tidak dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, produksi, dan transaksinya. Dalam cabang makroekonomi Islami telah dibangun beberapa teori mengenai : uang, kebijakan moneter, manajemen moneter Islami, rasio bagi hasil, kebijakan fiskal, dan ekonomi pembangunan.



Gambar 2. Epistemologi Ekonomi Islam

Sumber : Suseno

#### 4. Mikroekonomi Islami : Ringkasan

Mikroekonomi Islami menyajikan teori dan ajaran Islam dalam aspek konsumsi, produksi dan transaksi. Dalam teori konsumsi tujuan konsumsi adalah untuk memaksimalkan masalah, bukan

kepuasan. Masalah adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain. Masalah merupakan gabungan manfaat dan berkah. Terdapat lima jenis manfaat : material (murah, kaya, dsb), fisik/psikis (aman, sehat, nyaman, dsb), intelektual (informasi, pengetahuan), lingkungan (eksternalitas positif), dan inter-generational (kelestarian, keturunan). Sedangkan berkah mencakup kehalalan barang dan jasa, idak Israf, dan ridlo Allah.

Perilaku muslim sebagai konsumen diasumsikan memaksimisasi masalah tersebut dengan kendala berkah minimum, anggaran, israf dan moral Islam. Dengan demikian, permintaan muslim terhadap barang dan jasa sekurang-kurangnya mempertimbangkan harganya masing-masing, tambahan manfaatnya dan tambahan berkahnya. (Suseno, 2008).

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah itu milik semua manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian diantara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri; sedangkan orang lain tidak memiliki bagiannya sehingga banyak diantara anugerah yang diberikan Alla SWT kepada umat manusia itu masih berhak mereka miliki walaupun mereka tidak memperolehnya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT mengutuk dan membatalkan argument yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka memberikan bagian atau miliknya ini.

يَنْقَالَ اللَّهُ رَزَقَكُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا هُمْ قِيلَ وَإِذَا  
 آءَ لَوْ مَنْ أَنْطَعِمُ ءَامَنُوا الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ  
 بَيْنَ ضَلَلٍ فِي إِلَّا أَنْتُمْ إِنْ أَطَعَمَهُ اللَّهُ يَشُدُّ



Terjemahnya : "dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya yang berfirman kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam dan Hawa, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an (2:35) : ".. dan makanlah barang-barang yang penuh nikmat di dalamnya (surga) sesuai dengan kehendakmu ..." dan yang menyuruh semua umat manusia : "wahai umat manusia, makanlah apa yang ada di bumi, dengan cara yang sah dan baik" (Al-Qur'an (2:168)). Karena itu, orang mu'min berusaha mencari kenikmatan dengan menaati perintah-perintah-Nya dan memuaskan dirinya sendiri dengan barang-barang dan anugerah-anugerah yang dicipta (Allah) untuk umat manusia. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang

tidak baik atau merusak. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an : "Katakanlah, siapakah yang melarang (anugerah-anugerah Allah) yang indah, yang Dia cipta untuk hamba-hamba-Nya dan barang-barang yang bersih dan suci (yang Dia sediakan)". (Al-Qur'an (7:32)).

Konsumsi yang berlebihan dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah israf (pemborosan) atau tabzir (menghamburkan harta tanpa guna). Tabzir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni, untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang dengan tanpa aturan.

Salah satu ciri penting dalam Islam adalah bahwa ia tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislative yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaannya. Ciri khas Islam ini juga memiliki daya aplikatif terhadap kasus orang yang terlibat dalam pemborosan atau tabzir. Dalam hukum (fiqh) Islam, orang semacam itu seharusnya dikenai pembatasan-pembatasan dan, bila dianggap perlu, dilepaskan dan dibebaskan dari tugas mengurus harta miliknya sendiri. Dalam pandangan Syari'ah dia seharusnya diperlakukan sebagai orang tidak mampu dan orang lain seharusnya ditugaskan untuk mengurus hartanya selaku wakilnya (Kahf, 1995).

Dalam teori produksi, tujuan produksi adalah memaksimalkan masalah dengan mengenakan cara berproduksi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nilai dan prinsip produksinya mempertimbangkan keadilan, takaful dan

khilafah. Pertimbangan adil adalah proporsional dalam penggunaan modal dan tenaga kerja. Pertimbangan takaful adalah modal dan tenaga kerja tidak disubstitusikan. Sedangkan pertimbangan khilafah adalah tanggungjawab terhadap penggunaan sumberdaya terdekat. Dengan nilai dan prinsip tersebut, implikasi potensialnya adalah produksi harus membuka akses bagi setiap orang untuk bisa bekerja dan substitusi yang dipaksakan dari modal untuk tenaga kerja (pekerja) tidak diperbolehkan. Yang bisa terjadi hanyalah substitusi natural. Salah satu model ekonomi produksi Islami disajikan pada Lampiran 2.

Menurut Adiwarmanto (2002), dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada suatu tingkat harga.

Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniyaya, yaitu manakala salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai the price of the equivalent (harga sepadan), yaitu keadaan pasar yang kompetitif.

Dalam konsep Islam, monopoli, duopoly, oligopoly dalam artian hanya ada satu penjual, dua penjual, atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaannya, selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep harga sepadan. Produsen yang beroperasi dengan laba positif akan mengundang produsen lain untuk masuk ke dalam bisnis tersebut,

sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan, jumlah output yang ditawarkan bertambah dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian hingga keuntungan ekonominya nol. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk pasar.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk usaha yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang. Praktek bisnis yang dilarang adalah :

1. Talaqqi rukban, yaitu pedagang membeli barang penjual sebelum mereka masuk kota;
2. Mengurangi timbangan, karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit;
3. Menyembunyikan barang cacat karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas barang yang buruk;
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar;
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.
6. Transaksi najasy yaitu si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik;

7. Ikhtikar, yaitu mengambail keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi; dan
8. Ghaban faa-hisy (besar), yaitu dilarang menjual di atas harga pasar.

## 5. Makroekonomi Islami : Ringkasan

Makroekonomi Islami mengkaji beberapa hal. Pertama, ia membahas tentang struktur dan kebijakan moneter dalam Islam. Di dalamnya membahas tentang fungsi uang dan bank, sumber ekspansi moneter, instrument keuangan; struktur kelembagaan; dan kebijakan moneter. Kedua, membahas tentang uang dalam lintasan pemikir ekonomi Islam. Di dalamnya menguraikan tentang dinar dan dirham : mata uang Islam, mata uang di zaman Khalifah; uang di zaman Ibnu Taimiyah; uang menurut Al-Ghazali; uang menurut Ibn Khaldun; uang menurut al-Maqrizi; riba menjadi bunga.

Ketiga, membahas topic kontroversi bunga dan riba (perdebatan yang sudah berakhir). Di dalamnya dibahas tentang sejarah riba; pengertian bunga dan riba; macam-macam riba dan hukumnya; riba, bunga, dan bank; pendapat dan tanggapan tentang bunga bank tidak sama dengan riba; analisis terhadap praktik membungakan uang; penerapan sistem bunga pada bank konvensional; bunga bank sama dengan riba.

Keempat, membahas tentang teori rasio bagi hail. Di dalamnya membahas tentang investasi berdasarkan bagi hasil; perhitungan bagi hasil dana pihak ketiga; perhitungan bagi

keuntungan bagi deposan; perhitungan bagi hasil dalam penempatan dana (pembiayaan); peran bagi hasil bagi stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan.

Kelima, mengkaji tentang sistem kelembagaan keuangan bebas bunga dalam praktik. Di dalamnya dikembangkan kajian tentang tatanan kelembagaan, sistem lembaga keuangan syari'ah.

Keenam, mengkaji kebijakan moneter dalam Islam. Di dalamnya dikaji sejarah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian uang dan kebijakan moneter pada masa awal Islam, manajemen moneter Islami, manajemen moneter kasus di beberapa negara.

Ketujuh, mengkaji tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di dalamnya mencakup kajian tentang kebijakan fiskal masa Nabi Muhammad SAW, kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Terakhir, mengkaji tentang implikasi kebijakan moneter dan fiskal bagi pembangunan ekonomi. Di dalamnya mengkaji tujuan kebijakan fiskal dan moneter, implikasi pembangunan kebijakan moneter, implikasi pembangunan kebijakan fiskal, pembiayaan Islami dan pembangunan ekonomi.

## 6. Simpulan dan Saran

Paper ini memiliki posisi sebagai jembatan menuju pendalaman ekonomi Islam secara lebih komprehensif. Banyak sekali literatur ekonomi Islam, baik dalam bidang mikroekonomi maupun

makroekonomi. Beberapa diantaranya masih terlihat ada perbedaan. Ini tidak mengherankan, karena di kalangan ahli ekonomi muslim sendiri terdapat perbedaan mazhab yang menjadi sandaran filsafatnya. Ini menunjukkan bahwa untuk memahami perilaku ekonomi muslim, masih memerlukan kontribusi dari para ahli ekonomi untuk memperjelas replikanya.

Secara keseluruhan, ilmu ekonomi Islam merupakan advance atau perluasan dari ekonomi konvensional. Penilaian ini diangkat karena para ahli ekonomi muslim dalam faktanya telah membongkar asumsi atau postulat dasar para ahli ekonomi konvensional di dalam menjelaskan perilaku manusia.

Ilmu ekonomi Islam merupakan proyek akademik yang belum paripurna. Ini membuka ruang bagi kita semua untuk mengisi penyempurnaan ilmunya. Para ahli ekonomi muslim perlu mengkonsepsikan dan membangun teori secara lebih rigor, agar bisa menginspirasi para ahli ekonomi lainnya untuk melakukan penelitian empiris, sehingga asumsi mereka bisa teruji, dievaluasi dan diperbaiki.

## 7. Daftar Pustaka

- Karim, Adiwarmanto. 2002. *Ekonomi Mikro Islami*. The International Institute of Islamic Thought Indonesia. Jakarta.
- Khan, Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies. Islamabad.

Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam : Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*. PT. Salemba Empat Patria. Jakarta.

Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. BPFE UGM. Yogyakarta.

Muhammad. 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Ekonisia. Yogyakarta.

Sarkaniputra, Murasa, 2005. *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. P3EI, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Suseno, P. 2008. *Dasar-Dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam*. Disajikan pada Workshop Nasional Pengajaran Ekonomi Islam untuk Perguruan Tinggi di UII-Yogyakarta.

Tahir, S; Ghazali, A; and Agil, S.O.S. 1992. *Reading in Microeconomics : An Islamic Perspektif*. Longman Malaysia.

**Lampiran 1 : Sebaran Populasi Muslim Dunia**

| Rank | Country              | Population                 | Muslim %               | Main sect  | Religion and state             | Type of government              |
|------|----------------------|----------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 14   | Saudi Arabia         | 27,601,038 <sup>(19)</sup> | 100% <sup>(19)</sup>   | Sunni      | Islamic state <sup>(6)</sup>   | Absolute monarchy               |
| 4    | Nigeria              | 146,255,000 <sup>(2)</sup> | 50% <sup>(10)</sup>    | Sunni      | None                           | Presidential Federal Republic   |
| 20   | Burkina Faso         | 13,228,000                 | 50% <sup>(8)</sup>     | Sunni      | Secular                        | Semi-presidential republic      |
| 34   | Chad                 | 5,041,890                  | 54% <sup>(100)</sup>   | Sunni      | Secular                        | Presidential republic           |
| 18   | Kazakhstan           | 15,217,711 <sup>(20)</sup> | 57% <sup>(5)</sup>     | Sunni      | Secular <sup>(6)</sup>         | Presidential republic           |
| 35   | Eritrea              | 5,029,475                  | 60% <sup>(102)</sup>   | Sunni      | None                           | Presidential republic           |
| 36   | Lebanon              | 4,195,453                  | 60% <sup>(104)</sup>   | Shia/Sunni | None                           | Parliamentary democracy         |
| 26   | Sierra Leone         | 6,294,774 <sup>(1)</sup>   | 60% <sup>(8)</sup>     | Sunni      | None                           | Presidential republic           |
| 13   | Malaysia             | 27,730,000 <sup>(40)</sup> | 60.4% <sup>(11)</sup>  | Sunni      | State religion <sup>(6)</sup>  | Parliamentary democracy and EM  |
| 47   | Brunei               | 361,371 <sup>(118)</sup>   | 67% <sup>(17)</sup>    | Sunni      | State religion                 | Absolute monarchy               |
| 8    | Sudan                | 39,379,358                 | 70% <sup>(2)</sup>     | Sunni      | None                           | Authoritarian republic          |
| 32   | Kyrgyzstan           | 5,356,069                  | 75% <sup>(8)</sup>     | Sunni      | Secular <sup>(6)</sup>         | Semi-presidential republic      |
| 31   | United Arab Emirates | 5,432,746 <sup>(9)</sup>   | 76% <sup>(9)</sup>     | Sunni      | State religion <sup>(6)</sup>  | Federal constitutional monarchy |
| 45   | Oman                 | 744,029 <sup>(124)</sup>   | 77.5% <sup>(12)</sup>  | Sunni      | State religion <sup>(12)</sup> | Absolute monarchy               |
| 43   | Bahrain              | 1,046,814                  | 81% <sup>(106)</sup>   | Shia       | State religion <sup>(12)</sup> | Constitutional monarchy         |
| 30   | Kuwait               | 3,389,639 <sup>(10)</sup>  | 85% <sup>(10)</sup>    | Sunni      | State religion <sup>(11)</sup> | Constitutional monarchy         |
| 24   | Guinea               | 10,211,437                 | 85% <sup>(7)</sup>     | Sunni      | Secular                        | Presidential republic           |
| 1    | Indonesia            | 228,582,000                | 86.1% <sup>(1)</sup>   | Sunni      | None                           | Presidential democracy          |
| 15   | Uzbekistan           | 27,372,000                 | 89% <sup>(6)</sup>     | Sunni      | Secular                        | Presidential republic           |
| 33   | Turkmenistan         | 5,110,023                  | 89% <sup>(2)</sup>     | Sunni      | Secular <sup>(8)</sup>         | Parliamentary republic          |
| 41   | Kosovo               | 2,100,000 <sup>(120)</sup> | 90% <sup>(12)</sup>    | Sunni      | Secular <sup>(12)</sup>        | Parliamentary republic          |
| 42   | The Gambia           | 1,700,000                  | 90% <sup>(14)</sup>    | Sunni      | Secular                        | Presidential republic           |
| 5    | Egypt                | 77,100,000 <sup>(13)</sup> | 90% <sup>(13)</sup>    | Sunni      | State religion <sup>(14)</sup> | Semi-presidential republic      |
| 17   | Syria                | 19,405,000                 | 90% <sup>(5)</sup>     | Sunni      | None <sup>(9)</sup>            | Authoritarian republic          |
| 19   | Niger                | 13,272,679                 | 90% <sup>(6)</sup>     | Sunni      | Secular <sup>(11)</sup>        | Parliamentary democracy         |
| 21   | Mali                 | 11,995,402                 | 90% <sup>(5)</sup>     | Sunni      | Secular                        | Semi-presidential republic      |
| 40   | Oman                 | 2,577,000 <sup>(11)</sup>  | 93% <sup>(17)</sup>    | Ibadi      | State religion <sup>(14)</sup> | Absolute monarchy               |
| 26   | Azerbaijan           | 8,676,000 <sup>(7)</sup>   | 93.4% <sup>(7)</sup>   | Shia       | Secular <sup>(7)</sup>         | Presidential republic           |
| 46   | Djibouti             | 466,374                    | 94% <sup>(13)</sup>    | Sunni      | Secular                        | Semi-presidential republic      |
| 22   | Senegal              | 11,658,000                 | 94% <sup>(7)</sup>     | Sunni      | Secular                        | Semi-presidential republic      |
| 37   | Palestine            | 4,148,000                  | 95% <sup>(10)</sup>    | Sunni      | None                           | Parliamentary democracy         |
| 30   | Jordan               | 5,988,565                  | 95% <sup>(10)</sup>    | Sunni      | Islamic                        | Constitutional monarchy         |
| 12   | Iraq                 | 29,221,181 <sup>(17)</sup> | 97% <sup>(8)</sup>     | Shia       | State religion                 | Parliamentary democracy         |
| 2    | Pakistan             | 172,800,000 <sup>(1)</sup> | 97% <sup>(5)</sup>     | Sunni      | Islamic state <sup>(7)</sup>   | Semi-presidential republic      |
| 27   | Tajikistan           | 7,215,700                  | 97% <sup>(7)</sup>     | Sunni      | Secular <sup>(7)</sup>         | Presidential republic           |
| 29   | Libya                | 6,173,579 <sup>(6)</sup>   | 97% <sup>(8)</sup>     | Sunni      | State religion <sup>(8)</sup>  | Jamahiriyah Revolution          |
| 44   | Comoros              | 788,000                    | 98% <sup>(10)</sup>    | Sunni      | State religion                 | Federal republic                |
| 7    | Iran                 | 70,495,782 <sup>(2)</sup>  | 98% <sup>(2)</sup>     | Shia       | Islamic state <sup>(2)</sup>   | Presidential republic           |
| 23   | Tunisia              | 10,363,577                 | 98% <sup>(5)</sup>     | Sunni      | State religion <sup>(10)</sup> | Presidential republic           |
| 9    | Algeria              | 33,769,669 <sup>(3)</sup>  | 98% <sup>(2)</sup>     | Sunni      | State religion <sup>(4)</sup>  | Presidential republic           |
| 10   | Afghanistan          | 32,738,376 <sup>(3)</sup>  | 99% <sup>(1)</sup>     | Sunni      | Islamic state <sup>(2)</sup>   | Presidential republic           |
| 11   | Morocco              | 33,723,418                 | 99% <sup>(3)</sup>     | Sunni      | State religion <sup>(5)</sup>  | Constitutional monarchy         |
| 16   | Yemen                | 23,013,376                 | 99% <sup>(6)</sup>     | Sunni/Shia | Islamic state <sup>(1)</sup>   | Presidential republic           |
| 48   | Maldives             | 350,000 <sup>(18)</sup>    | 99.8% <sup>(14)</sup>  | Sunni      | State religion <sup>(11)</sup> | Presidential republic           |
| 6    | Turkey               | 71,517,100 <sup>(15)</sup> | 99.8% <sup>(17)</sup>  | Sunni      | Secular <sup>(15)</sup>        | Parliamentary democracy         |
| 25   | Senegal              | 9,558,666                  | 99.9% <sup>(7)</sup>   | Sunni      | State religion                 | Coalition government            |
| 39   | Mauritania           | 3,124,000 <sup>(11)</sup>  | 99.99% <sup>(11)</sup> | Sunni      | Islamic state <sup>(14)</sup>  | Military junta                  |

Sumber : [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses tanggal 25 Agustus 2009